

## ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2017-2021

Selpi<sup>1</sup>

*selpilossu@gmail.com*

Mesak Iek<sup>2</sup>

*mesakiek@feb.uncen.ac.id*

Hans Z. Kaiwai<sup>3</sup>

*hanskaiwai@feb.uncen.ac.id*

### ABSTRACT

*This research aims to identify leading sectors and changes in the economic structure without mining in Mimika Regency in 2017–2021. The data used in this research is secondary data on Gross Regional Domestic Product (GRDP) according to business fields on the basis of constant prices in 2010, with data years 2017–2021. The analysis tools used are Location Quotient, Shift Share Analysis, and Klassen Typology. The results of the location quotient analysis without mining found that there are 8 basic (leading) sectors, namely: 1) the electricity and gas procurement sector; 2) the wholesale and retail trade sector; 3) the car and motorcycle repair sector; 4) the transportation and warehousing sector; 5) the accommodation and food and drink provision sector; 6) the information and communication sector; 6) the financial services and insurance sector; 7) the real estate sector; and 8) the corporate services sector. Furthermore, the results of the shift share analysis show that, in aggregate, there have been structural changes in the economic sector in Mimika Regency during 2017–2021, where the entire economic sector is classified as progressive and growing faster than the same sector in Papua Province. Meanwhile, according to the Klassen Typology analysis, the economic sector in Mimika Regency, which is classified as a developed sector and is growing rapidly, consists of 8 sectors, including: 1) the electricity and gas procurement sector; 2) the wholesale and retail trade sector; 3) car and motorcycle repair; 4) the transportation and warehousing sector; 5) the accommodation and food and drink provision sector; 6) the information and communication sector; 6) the financial services and insurance sector; 7) the real estate sector; and 8) the corporate services sector. The regional government needs to continue to encourage the process of structural change in the economic sector in Mimika Regency so that sectors that have the potential to develop can grow more quickly. The emergence of new sectors is a good thing for the regional economy. In the future, it is necessary to carry out analysis with valid data in order to find changes in the regional economic structure appropriately so that it can support a more optimal regional economy.*

**Keywords:** *Leading sectors and changes in economic structure without mining*

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikator keberhasilan dari pembangunan yang telah dilakukan di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dipengaruhi oleh akumulasi modal, sumber daya alam, sumber daya manusia baik jumlah maupun tingkat kualitas penduduknya, kemajuan teknologi, akses terhadap informasi, keinginan untuk inovasi dan mengembangkan diri serta budaya kerja.

Desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah dan masyarakat daerah untuk berkembang secara mandiri sehingga Pemerintah Daerah dituntut kreatif dalam mengembangkan perekonomian. Peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Investasi akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat menimbulkan multiplier effect terhadap sektor-sektor lainnya terutama yang ditimbulkan oleh sektor sektor yang menjadi basis dan unggulan daerah tersebut. Selain investasi pihak swasta anggaran Pemerintah Daerah merupakan salah satu komponen

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

<sup>2</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

<sup>3</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

yang sangat penting dalam pembangunan suatu perekonomian daerah. Setiap daerah mempunyai keterbatasan sumberdaya dan sumber pendapatan dalam melaksanakan pembangunan. Dengan demikian perlu pengalokasian anggaran yang tepat untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan.

Kabupaten Mimika merupakan salah satu kabupaten otonom yang mempunyai keleluasaan (descretion) dalam mengembangkan potensi ekonomi dan sumber-sumber keuangan daerah yang dimilikinya. Data potensi perekonomian Kabupaten Mimika dapat dilihat dari berbagai sektor produksi yang menghasilkan barang dan jasa yang oleh BPS dikelompokkan ke dalam 17 lapangan usaha yang merupakan variabel perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selama 5 tahun terakhir (2017-2021), potensi perekonomian Kabupaten Mimika didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian.

Data BPS Kabupaten Mimika tahun 2021 Menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Mimika sangat dominan, yakni tahun 2017 kontribusi pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Mimika sebesar 87,02%. Dan hanya turun 0,61% di tahun 2021 yakni sebesar 86,42%. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika lebih dipengaruhi oleh Sektor Pertambangan dan penggalian. Keberadaan perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yang beroperasi di Kabupaten Mimika memiliki andil yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika.

Melihat kondisi perekonomian Kabupaten Mimika dengan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sektor Pertambangan dan Penggalian, maka pemerintah daerah Kabupaten Mimika perlu mengubah paradigma pembangunan ekonomi yang dipimpin sektor Pertambangan dan Penggalian, karena sektor tersebut memberi Trickle Down Effect yang sangat kecil ke kabupaten Mimika. Oleh karena itu, pemerintah daerah saat ini jangan terlena dengan sektor pertambangan, melainkan mengembangkan sektor-sektor nontambang menjadi alternatif lain yang akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Pengembangan sektor unggulan di luar sektor Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Mimika merupakan upaya mutlak yang harus dilakukan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika ke depan. Untuk itu, analisis dalam penelitian ini akan mengeluarkan sektor Pertambangan dan Penggalian dengan tujuan agar dapat mengidentifikasi sektor-sektor unggulan lain di Kabupaten Mimika. Dalam penelitian ini juga mencoba mendeskripsikan pola perubahan dan pertumbuhan sektoral dalam perekonomian Kabupaten Mimika selama 5 tahun terakhir, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi Kabupaten Mimika di masa yang akan datang.

### **Rumusan Masalah**

Bertolak pada uraian latar belakang sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : (1) Apa saja sektor unggulan di luar sektor tambang dan galian dalam perekonomian Kabupaten Mimika ? (2) Bagaimanakah keadaan perubahan struktur ekonomi yang terjadi di Kabupaten Mimika tahun 2017 – 2021?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai antara lain : (1) Mengidentifikasi sektor unggulan dalam perekonomian Kabupaten Mimika. (2) menganalisis perubahan struktur ekonomi yang terjadi di Kabupaten Mimika selama 5 tahun terakhir (2017-2021).

### **Manfaat Penelitian**

1. Memberikan informasi tentang perkembangan sektor basis (unggulan) dan potensial, struktur ekonomi, dan status perekonomian di Kabupaten Mimika tanpa sektor pertambangan dan galian.
2. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Mimika.
3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah.

## Tinjauan Pustaka

### Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad : 2010), atau disebut juga pembangunan ekonomi daerah diartikan sebagai suatu proses pembentukan institusi institusi baru, pembangunan industri industri alternative, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, tujuan dari pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat yang di daerah tersebut sehingga untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama sama mengambil inisiatif untuk melakukan pembangunan daerah dengan mengelola setiap sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Perbedaan kondisi setiap daerah membawa implikasi bahwa pola pembangunan yang akan diterapkan setiap daerah berbeda beda sesuai dengan karakteristik dan ke khasan daerah, karena peniruan pola kebijaksanaan yang diterapkan pada suatu daerah yang berhasil belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lainnya. Sehingga kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi, permasalahan, serta potensi yang di miliki daerah yang bersangkutan (Arsyad :2010), Rahardjo Adisasmata (2005), mendefinisikan bahwa pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari sumberdaya alam, tenaga kerja dan sumberdaya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, tehnologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.

Pertumbuhan regional dapat terjadi akibat penentuan endogen atau eksogen, yaitu faktor faktor yang terdapat di dalam daerah yang bersangkutan ataupun faktor-faktor yang terdapat di luar daerah atau kombinasi keduanya. Penentuan faktor endogen meliputi distribusi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal sedangkan faktor-faktor eksogen adalah tingkat permintaan dari daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah tersebut (Glasson :1990). Pertumbuhan ekonomi juga dapat dinilai sebagai dampak kebijaksanaan pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi dan sebagai indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan (Sirojuzilam: 2008 ).

Teori pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian penting dalam analisis ekonomi regional, karena pertumbuhan merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi regional/daerah yang mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas, dimana sasaran utama analisis pertumbuhan ekonomi regional adalah untuk menjelaskan mengapa suatu daerah dapat tumbuh cepat dan adapula daerah yang tumbuh lambat. Pada teori pertumbuhan ekonomi regional memasukkan unsur lokasi dan wilayah secara eksplisit (Sjafrizal : 2008).

Pada hakekatnya teori teori pembangunan ekonomi daerah membahas tentang metode analisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu. Pengembangan dari metode metode yang menganalisis perekonomian suatu daerah penting sekali kegunaannya untuk mengumpulkan data tentang perekonomian daerah yang bersangkutan serta proses pertumbuhannya yang kemudian dapat dipakai sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang ada.

Teori pertumbuhan ekonomi regional bertujuan untuk membahas secara rinci faktor faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, hal ini penting karena pada kenyataannya laju pertumbuhan ekonomi wilayah sangat bervariasi.

Secara garis besar ada lima (5) model yang membahas pertumbuhan ekonomi wilayah yaitu : (1) Model Basis Ekspor. Douglas C. North (1956 ) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah ditentukan oleh keuntungan kompetitif (Competitive advantage) yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Bila daerah yang bersangkutan dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang mempunyai keuntungan kompetitif sebagai basis untuk ekspor, maka pertumbuhan daerah yang bersangkutan akan dapat ditingkatkan, hal ini terjadi karena peningkatan ekspor dapat memberikan dampak berganda (multiplier Effect) pada daerah yang bersangkutan (Sjafrizal 2008). (2) Model

Interregional Income. Harry W Richardson ( 1991). Menyatakan bahwa model ini ekspor diasumsikan sebagai faktor yang berada dalam sistem (Endogeneous variable) yang ditentukan oleh perkembangan kegiatan perdagangan antar wilayah yang terdiri atas barang konsumsi dan barang modal. Sehingga modelnya seperti teori ekonomi Keynes yang dirumuskan sebagai berikut :  $Y_i = C_i + I_i + G_i + (X_i - M_i)$ . (3) Model Neo Klasik. Model ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya, sedangkan kegiatan produksi pada suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga ditentukan oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah (Sjafrizal 2008:95), karena kunci utama pertumbuhan ekonomi daerah adalah peningkatan kegiatan produksi maka pada model neo klasik ini fungsi produksi di formulasikan sebagai bentuk Cobb-Dougllass yaitu :  $Y = AK^\alpha L^\beta$ ,  $\alpha + \beta = 1$ ; dimana :  $Y =$  PDRB,  $K =$  modal,  $L =$  tenaga kerja. Penganut model neo klasik beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja pada permulaan pembangunan adalah kurang lancar, akibatnya modal dan tenaga kerja ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga ketimpangan pembangunan regional cenderung melebar (divergence), dengan semakin baiknya prasarana dan fasilitas komunikasi, maka mobilitas modal dan tenaga kerja tersebut akan terus lancar dengan demikian, nantinya setelah negara tersebut maju, maka ketimpangan pembangunan regional akan berkurang (convergence), sesuai dengan hipotesa Neo-klasik maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemajuan teknologi, peningkatan investasi dan peningkatan jumlah tenaga kerja suatu wilayah berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan, dan pada permulaan proses pembangunan, ketimpangan regional cenderung meningkat, tetapi setelah titik maksimum bila pembangunan terus dilanjutkan, maka ketimpangan daerah akan berkurang dengan sendirinya (Sjafizal 2008). (4) Model Penyebab Kumulatif. Gunnar Myrdal dalam tulisanya, *Economic theory and underdeveloped regions* (1975), mengungkapkan sebuah konsep yang dikenal sebagai proses kausasi kumulatif. Menurut Myrdal bahwa dalam proses pembangunan terdapat faktor-faktor yang akan memperburuk perbedaan tingkat pembangunan di berbagai daerah, keadaan tersebut muncul sebagai akibat dari berlangsungnya kausasi kumulatif, sehingga pembangunan di daerah yang lebih maju akan menyebabkan suatu keadaan yang akan menimbulkan hambatan yang lebih besar pada daerah-daerah yang lebih terbelakang untuk dapat maju dan berkembang. Suatu keadaan yang menghambat pembangunan ini digolongkan sebagai backwash effect. Disisi lain perkembangan di daerah-daerah yang lebih maju ternyata juga dapat menimbulkan suatu keadaan yang akan mendorong perkembangan bagi daerah-daerah yang lebih miskin. Suatu keadaan yang akan dapat mendorong pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang lebih miskin dinamakan spread Effect (Arsyad 2010). Richardson (1991) memformulasikan argumentasi model penyebab kumulatif ini secara sederhana menggunakan persamaan linear, formulasi model dimulai dengan hubungan positif antara peningkatan produktivitas,  $r$ , dengan peningkatan produksi regional ( PDRB ),  $y$ , dengan formula sebagai berikut :  $r = \alpha + \beta y$ ;  $\alpha$ ,  $\beta =$  konstanta. hipotesa yang dapat ditarik dari model penyebab kumulatif adalah bahwa terdapat proses pertumbuhan yang berkumulatif sehingga pengurangan ketimpangan regional tidak dapat diserahkan pada pasar, tetapi melalui kebijakan pemerintah yang insentif yang melihat tendensi dari ketimpangan pembangunan antar daerah, kecenderungan ini selanjutnya akan dijadikan dasar untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah serta penanggulangan ketimpangan regional, bila terjadi tendensi untuk divergence, maka kebijakan untuk mendorong pemerataan pembangunan menjadi sangat penting, tapi bila tendensinya bersifat convergence, maka kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih penting. (5) Model daya Tarik. Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan, teori ekonomi yang mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap para industrialis melalui pemberian subsidi dan insentif.

#### **Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah**

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya-sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-sumberdaya swasta secara bertanggungjawab. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dapat dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi (economic entity) yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain. Pentingnya campur tangan pemerintah pada pembangunan daerah adalah untuk mencegah akibat-akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan

daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil hasilnya dapat dinikmati masyarakat di daerah. Keadaan sosial ekonomi yang berbeda dari setiap daerah akan membawa implikasi bahwa cakupan campur tangan pemerintah untuk tiap daerah berbeda pula, perbedaan tingkat pembangunan antar daerah, mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan, (Arsyad, 2005).

Berkenaan dengan campur tangan pemerintah untuk mendorong perkembangan daerah-daerah miskin masih ada perbedaan pendapat ada yang setuju dan ada yang menolak, pendapat yang setuju dengan adanya campur tangan pemerintah dalam pembangunan daerah mengemukakan pendapatnya yaitu :

1. Jika perekonomian dikendalikan oleh mekanisme pasar, akan timbul keadaan yang menghambat perkembangan ekonomi di daerah terbelakang.
2. Dalam mekanisme pasar, keputusan tentang lokasi kegiatan ekonomi lebih banyak didasarkan pada metode coba-coba, dengan kata lain mekanisme pasar belum tentu dapat menciptakan efisiensi yang optimal dalam menentukan kegiatan ekonomi.
3. Campur tangan pemerintah dibutuhkan oleh negara-negara yang baru berkembang, mengingat efisiensi ekonomi masih rendah, sehingga kurang mampu bersaing dengan negara maju.
4. Menghemat pengeluaran pemerintah untuk pembangunan di masa mendatang. Proses pembangunan yang sedang berjalan disuatu daerah sebagai akibat campur tangan pemerintah akan mendorong pembangunan daerah sekitarnya.
5. Tujuan pembangunan bukan hanya semata mata bersifat ekonomi, tetapi bersifat social politik. Oleh karena itu jika kegiatan ekonomi hanya berpusat pada satu daerah maka hal tersebut akan membawa masalah yang cukup rumit.

Adapun implikasi dari perencanaan pembangunan daerah antara lain :

1. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistis memerlukan pemahaman mengenai hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional.
2. Suatu yang baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya.
3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan biasanya sangat berbeda antara tingkat daerah dan tingkat pusat. Perencanaan daerah yang efektif harus dapat membedakan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan.

Menurut Blakey (1994), ada enam tahap perencanaan pembangunan ekonomi daerah adalah sebagai berikut :

1. Tahap pengumpulan dan analisis data yang terdiri dari : penentuan basis ekonomi, analisis struktur tenaga kerja, evaluasi kebutuhan tenaga kerja, analisis peluang dan kendala pembangunan, analisis kapasitas kelembagaan.
2. Tahap pemilihan strategi yang terdiri dari : penentuan tujuan dan kriteria, penentuan kemungkinan kemungkinan tindakan dan penyusunan strategi.
3. Pemilihan proyek-proyek pembangunan yang terdiri dari : Identifikasi proyek dan penilaian viabilitas proyek.
4. Pembuatan rencana tindakan yang terdiri dari : pra penilaian hasil proyek, pengembangan input proyek, penentuan alternative sumber pembiayaan dan identifikasi struktur proyek.
5. Penentuan rincian proyek meliputi pelaksanaan studi kelayakan bisnis, bussiness plan, dan pengembangan, monitoring, serta evaluasi program.
6. Persiapan perencanaan secara keseluruhan dan implementasi meliputi penyiapan skedul, penyusunan program pembangunan secara keseluruhan, targetting dan marketing aset-aset masyarakat, serta pemasaran kebutuhan keuangan.

Adapun peran pemerintah dalam proses pembangunan daerah yaitu sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator bagi lahirnya inisiatif-inisiatif pembangunan daerah.

### **Sektor Unggulan**

Mengenal lebih mendalam potensi yang dimiliki serta peluang pengembangannya adalah suatu yang sangat mendasar dalam proses perencanaan pembangunan. Khususnya untuk perencanaan dalam konteks lokal. Sebab tanpa pengetahuan tentang hal tersebut, maka perencanaan pembangunan daerah berjalan tanpa ada prioritas. Implikasinya kemudian adalah pembangunan daerah berjalan secara stagnan. Oleh karena itu, maka penting sektor mana yang menjadi prioritas dan berpeluang untuk dikembangkan sebagai basis ekonomi.

Sektor Unggulan merupakan derivasi dari sebuah postulat yang dikembangkan dalam kajian perdagangan internasional, di mana suatu negara harus memiliki sebuah keunggulan. Selanjutnya kata

keunggulan tersebut mewarnai wacana perdagangan dalam negeri, dan implikasinya di masing masing negara yang masuk dalam perdagangan internasional mengembangkan ekonominya berdasarkan keunggulan komparatif yang dimiliki.

Postulat dari comparative advantage adalah bahwa jika sebuah bangsa ingin mendapatkan keuntungan atau manfaat dalam perdagangan internasional, maka perlu adanya keunggulan comparative absolute yang dimiliki suatu bangsa atau negara (Dominick Salvatore, 1996). Implikasinya adalah suatu bangsa diharapkan tidak terlalu berambisi mengembangkan komoditas secara menyeluruh yang justru tidak memberikan keunggulan comparative jika diperdagangkan, baik secara nasional maupun secara internasional.

Jika pengertian tersebut ditarik dalam konteks pembangunan regional, maka suatu daerah yang ingin mendapatkan keuntungan atau manfaat dalam interaksinya dengan region atau daerah lain, maka daerah tersebut harus mengembangkan salah satu sektor yang mempunyai keunggulan (comparative advantage). Keunggulan comparative tersebut selanjutnya dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai konskuensi dan peningkatan kinerja Perekonomian Daerah.

### **Teori Perubahan Struktural**

Teori perubahan struktural menurut Todaro menitikberatkan pembahasan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh negara sedang berkembang, semula lebih bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern, yang didominasi oleh sektor industri dan jasa (Kuncoro, 2003). Pada dasarnya teori tentang perubahan struktural ini menjelaskan fenomena terjadinya perubahan struktur di negara sedang berkembang yang didominasi kegiatan perekonomian pedesaan menuju kepada perekonomian yang berorientasi perkotaan dalam bentuk industri maupun jasa. Perubahan struktur perekonomian yang semula mengandalkan sektor pertanian kemudian beralih ke sektor industri maupun jasa, akan dapat mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat, atau tingkat pendapatan antar sektor perekonomian. Secara umum transformasi struktural ditandai dengan peralihan dan pergeseran kegiatan perekonomian dari sektor primer (pertanian) menuju sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa). Kegiatan produksi barang dan jasa yang sering disebut lapangan usaha dalam penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat regional atau daerah, dikelompokkan ke dalam sembilan sektor yaitu (1) sektor pertanian; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas dan air bersih; (5) bangunan; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan, real estat dan jasa perusahaan, serta (9) jasa-jasa.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, selama 4 bulan, mulai dari bulan Februari s/d Mei 2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif, antara lain : (1) PDRB Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua periode 2017- 2021. (2) Mimika Dalam Angka dan Provinsi Papua Dalam Angka tahun 2021. (3) RPJMD Kabupaten Mimika tahun 2017 - 2021 dan Renstra Kabupaten Mimika tahun 2017 - 2021. (5) Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2017 - 2021. Dan (6) Dan data sekunder lainnya yang mendukung penelitian ini.

Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan (Library research), dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.”(Nazir, 1988). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan mempelajari berbagai literatur, buku-buku penunjang, referensi, peraturan-peraturan dan sumber lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

### **Teknik Analisis**

Guna mencapai tujuan penelitian ini maka, digunakan beberapa teknik yaitu :

#### **Analisis Location Quotient (LQ)**

Guna menentukan sektor basis dan non basis di Kabupaten Mimika digunakan metode analisis *Location Quotient* (LQ). Metode LQ digunakan untuk mengkaji kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian. Analisis LQ dilakukan dengan membandingkan

distribusi persentase masing-masing sektor di masing-masing wilayah Kabupaten atau kota dengan Provinsi.

Formula LQ yang digunakan (Lincoln Arsyad: 1999:390):

$$LQ = (vikt / vkt) / (Vikt / Vkt)$$

Di mana:

vikt = sektor ekonomi pembentuk PDRB wilayah studi

vkt = PDRB total wilayah studi

Vipt = sektor ekonomi pembentuk PDRB wilayah referensi

Vpt = PDRB total wilayah referensi

Dari hasil perhitungan analisis LQ maka masing-masing sektor ekonomi dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu :

1. Jika  $LQ > 1$ , maka sektor yang bersangkutan di wilayah studi lebih berspesialisasi dibandingkan dengan perekonomian wilayah referensi. Sektor ini dalam perekonomian di wilayah studi memiliki kebasis komparatif dan dikategorikan sebagai sektor basis.
2. Jika  $LQ = 1$ , maka sektor yang bersangkutan baik di wilayah studi maupun di tingkat perekonomian wilayah referensi memiliki tingkat spesialisasi yang sama.
3. Jika  $LQ < 1$ , maka sektor yang bersangkutan di wilayah studi kurang berspesialisasi dibandingkan dengan perekonomian wilayah referensi. Sektor ini dalam perekonomian di wilayah studi tidak memiliki kebasis komparatif dan dikategorikan sebagai sektor non basis.

#### **Metode Analisis Shift Share (Shift Share Analysis)**

Analisis shift share digunakan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor pada perekonomian wilayah Kabupaten Mimika. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja perekonomian daerah dan membandingkan dengan daerah yang lebih besar. Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam 3 (tiga) bidang yang saling berhubungan yaitu (Lincoln Arsyad, 1999: 139).

1. Pertumbuhan ekonomi wilayah referensi, yang menunjukkan pengaruh pertumbuhan ekonomi wilayah referensi terhadap perekonomian daerah.
2. Pergeseran Proporsional (Proportional Shift), yang menunjukkan perubahan relatif kinerja suatu sektor di daerah tertentu terhadap sektor yang sama direferensi provinsi atau nasional.
3. Pergeseran diferensial (Differential Shift) atau pengaruh kebasis kompetitif yang memberikan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan referensi. Jika pergeseran diferensial dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut lebih tinggi daya saingnya dari pada industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan referensi.

Teknik analisis shift share ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel wilayah seperti kesempatan kerja, nilai tambah, pendapatan atau output selama waktu tertentu dalam hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan propinsi (N), bauran industri atau industri mix (M) dan keunggulan kompetitif (C). Pengaruh pertumbuhan propinsi disebut pengaruh pangsa pasar (share), pengaruh bauran industri disebut proporsional shift atau bauran komposisi, sedangkan pengaruh keunggulan kompetitif disebut regional share atau deferensial shift. Itulah sebabnya disebut teknik shift share (Prasetyo Soepono dalam Faizal Reza Salahuddin, 2005:39-44).

Persamaan shift-share untuk sektor i di daerah j adalah :

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Persamaan tersebut mengandung pengertian bahwa pertumbuhan PDRB ( $D_{ij}$ ) merupakan hasil penjumlahan dari pengaruh propinsi ( $N_{ij}$ ), pengaruh bauran industri ( $M_{ij}$ ), dan pengaruh keunggulan kompetitif ( $C_{ij}$ ). Bila analisis tersebut diterapkan pada nilai ( $E$ ), maka persamaannya :

$$D_{ij} = E * ij - E_{ij}$$

$$N_{ij} = E_{ij} \cdot rn$$

$$M_{ij} = E_{ij} \cdot (rin - rn)$$

$$C_{ij} = E_{ij} \cdot (rij - rin)$$

Dimana :  $rij$  = laju pertumbuhan sektor i di daerah j.  
 $rin$  = laju pertumbuhan sektor i di propinsi.  
 $rn$  = laju pertumbuhan PDRB propinsi.

Laju pertumbuhan PDRB propinsi maupun laju pertumbuhan sektor i di daerah j diperoleh dari:

$$rij = (E^{*ij} - E_{ij}) / E_{ij}$$
$$rin = (E^{*ij} - E_{in}) / E_{in}$$
$$rn = (E^{*n} - E_n) / E_n$$

Dimana :

$E_{ij}$  = Nilai tambah sektor i di daerah j pada awal tahun analisis.

$E^{*ij}$  = Nilai tambah sektor i di daerah j pada akhir tahun analisis.

$E_{in}$  = Nilai tambah sektor i di propinsi pada awal tahun analisis.

$E^{*in}$  = Nilai tambah sektor i di propinsi pada akhir tahun analisis.

$E_n$  = Nilai tambah PDRB propinsi pada awal tahun analisis.

$E^{*n}$  = Nilai tambah PDRB propinsi pada akhir tahun analisis.

Untuk suatu daerah, pertumbuhan propinsi, bauran industri dan keunggulan kompetitif dapat dijumlahkan untuk semua sektor sebagai keseluruhan daerah, sehingga persamaan Shift-Share untuk sektor i di daerah j:

$$D_{ij} = E_{ij} \cdot rn + E_{ij} (rin - rn) + E_{ij} (rij - rin)$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Temuan dan Rekomendasi

Bertolak pada hasil analisis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa temuan sebagai berikut :

#### Temuan

1. Hasil analisis perhitungan LQ di Kabupaten Mimika menunjukkan bahwa ada 8 sektor yang berperan sebagai sektor ekonomi basis (unggulan) di Kabupaten Mimika yaitu; 1) sektor Pengadaan Listrik dan Gas, 2) sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 3) sektor Transportasi dan Pergudangan, 4) sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 5) sektor Informasi dan Komunikasi, 6) sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, 7) sektor Real Estate dan 8) sektor Jasa Perusahaan. Identifikasi sektor basis ekonomi suatu wilayah tidak serta merta menunjukkan keunggulan tingkat perekonomian daerah tersebut. Metode ini juga mengandalkan data yang bersifat historis sehingga apabila terjadi perubahan kebijakan maupun kondisi perekonomian di masa depan, hal tersebut dapat merubah peta persebaran sektor basis ekonomi maupun nonbasis suatu daerah. Namun pendekatan LQ cukup memberikan informasi mengenai potensi dan keunggulan sektor ekonomi suatu daerah.
2. Secara agregat terjadi perubahan struktural sektor ekonomi di Kabupaten Mimika dalam tahun 2017 – 2021. Hasil analisis Shift-Share menunjukkan keseluruhan sektor ekonomi Kabupaten Mimika tergolong progresif dan tumbuh lebih cepat dibanding dengan sektor yang sama di Provinsi Papua. Dilihat dari komponen pertumbuhan wilayah provinsi ( $N_{ij}$ ), menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua telah memberikan pengaruh yang positif terhadap kegiatan perekonomian Kabupaten Mimika. Dilihat dari komponen bauran industri ( $M_{ij}$ ), menunjukkan bahwa bauran industri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika. Sedangkan dilihat dari komponen keunggulan kompetitif ( $C_{ij}$ ) menunjukkan bahwa sektor ekonomi Kabupaten Mimika secara agregat memiliki daya saing atau keunggulan kompetitif yang rendah terhadap sektor ekonomi yang sama di Provinsi Papua. Keadaan ini perlu mendapat perhatian dari pemangku kebijakan untuk merumuskan strategi yang tepat bagi pengembangan ekonomi di wilayah Kabupaten Mimika.

#### Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian ini maka, tim peneliti merekomendasikan beberapa point yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah Kabupaten Mimika perlu mengembangkan sektor ekonomi lainnya yang dianggap potensial untuk dijadikan sektor unggulan agar ketergantungan terhadap sektor pertambangan dan penggalian secara perlahan dapat dikurangi. Dukungan terhadap sektor lainnya dapat dilakukan dengan melakukan investasi secara besar-besaran agar dapat mengurangi kesenjangan antar sektor.
2. Pemerintah daerah perlu terus mendorong proses perubahan struktural sektor ekonomi di Kabupaten Mimika agar sektor lain yang memiliki potensi untuk berkembang dapat tumbuh lebih cepat.

- Kemunculan sektor-sektor baru merupakan hal yang baik bagi perekonomian daerah kedepannya. Jika dapat dioptimalkan maka sektor-sektor baru tersebut dapat menopang perekonomian daerah yang bersangkutan.
3. Pemerintah daerah juga perlu mendorong sektor-sektor industri yang ada dengan strategi bauran industri yang tepat agar aktivitas ekonomi sektor tersebut dapat tumbuh lebih cepat dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi.
  4. Pemerintah daerah perlu mengembangkan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki melalui berbagai inovasi dan produktivitas yang tinggi agar dapat memperkuat daya saing daerah. Selain itu diperlukan konsistensi kebijakan dan sinergi antar berbagai stakeholder yang ada.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Hasil analisis perhitungan LQ di Kabupaten Mimika menunjukkan bahwa ada 8 sektor yang berperan sebagai sektor ekonomi basis (unggulan) di Kabupaten Mimika yaitu; 1) sektor Pengadaan Listrik dan Gas, 2) sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 3) sektor Transportasi dan Pergudangan, 4) sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 5) sektor Informasi dan Komunikasi, 6) sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, 7) sektor Real Estate dan 8) sektor Jasa Perusahaan.
2. Hasil analisis Shift-Share menunjukkan keseluruhan sektor ekonomi Kabupaten Mimika tergolong progresif dan tumbuh lebih cepat dibanding dengan sektor yang sama di Provinsi Papua. Dilihat dari komponen pertumbuhan wilayah provinsi (Nij), menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua telah memberikan pengaruh yang positif terhadap kegiatan perekonomian Kabupaten Mimika. Dilihat dari komponen bauran industri (Mij), menunjukkan bahwa bauran industri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika. Sedangkan dilihat dari komponen keunggulan kompetitif (Cij) menunjukkan bahwa sektor ekonomi Kabupaten Mimika secara agregat memiliki daya saing atau keunggulan kompetitif yang rendah terhadap sektor ekonomi yang sama di Provinsi Papua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Rahardjo (2005 ). Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah. Graha Ilmu Yogyakarta.
- Arsyad. Lincolin. 2005. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi kedua. Bagian Penerbitan STIE YKPN. Yogyakarta
- ..... 2010. Ekonomi Pembangunan. Edisi keempat. Bagian Penerbitan STIE YKPN. Yogyakarta.
- Budiono.1985. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Direktorat jenderal Perimbangan Keuangan data .Data series. APBD tahun 2007- 2011. [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)
- Glasson. Jhon. 1990. Pengantar Perencanaan Regional. terjemahan Paul Sitohang. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- Hoover. EM. 1977 . Pengantar Ekonomi Regional . Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia. Jakarta
- Irman dan Fachrizal Bachri. “Analisis Potensi Sektoral Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan”. Dalam Jurnal Kajian Ekonomi Vol. 2. No. 1. Hal. 77-103, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2003.
- Kuncoro.Mudrajad.2003. Ekonomi Pembangunan Teori. Masalah dan Kebijakan. Edisi Pertama. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Myrdal, Gunnar. 1957, Economic Theory and Underdeveloped Regions, London : Penguin Books
- North, Douglass C. 1991. Institutions, Journal of Economic Perspective, Vol % 91), PP.97-112

- Rachbini. Didik J. 2001. *Pembangunan Ekonomi & Sumber Daya Manusia*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Richardson. Harry W. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Terjemahan Paul Sitohang. Edisi Revisi. Lembaga Penerbit FE UI. Jakarta.
- Salvator. Dominick . 1996 . *principles of Economics*.second Edition.
- Sjafrizal.1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Prisma LP3ES. No 3 Tahun XXVI :27-38
- Sirojuzilam. 2008. *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan regional, ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Timur Propinsi Sumatera Utara*, Pustaka Bangsa pers
- Soetiono. Dedi NS. 2011. *Ekonomi Pengembangan Wilayah*. Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- Setiawan, I Made Darma, “Peranan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat: Pendekatan Input-Output Multiregional”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Universitas Warmadewa, Denpasar, 2005.
- Tarigan. Robinson. 2007. *Ekonomi Regional. Teori dan Aplikasi*. PT. Bumi Aksara. Cetakan Keempat. Jakarta.
- Todaro. Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerbit Erlangga. Edisi Ketujuh. Jakarta.